

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

Dalam sub bab deskripsi teori ini memaparkan berbagai landasan teori yang mendukung pelaksanaan penelitian ini, yaitu teori-teori mengenai Pendidikan Kejuruan SMK, Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti, Implementasi Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Evaluasi. Deskripsi teori ini akan memberikan pemahaman yang lebih detail dan khusus mengenai topik-topik yang akan dibahas sehingga memudahkan dalam proses analisa pada bab selanjutnya.

1. Evaluasi Program

Kajian teori mengenai evaluasi program akan diuraikan menjadi beberapa bagian, yaitu : (a) pengertian evaluasi program, (b) model-model evaluasi program, (c) tujuan evaluasi program, dan (d) manfaat evaluasi.

a. Pengertian Evaluasi Program

Menurut Arikunto (2003), mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan.

Menurut Sax (1980) dalam Zainal (2012) berpendapat bahwa “*evaluation is a process through which a value judgement or decision is made from a variety of observations and from the background and training of the evaluator*”. (evaluasi adalah suatu proses dimana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang serta pelatihan dari evaluator). Dari dua

rumusan tentang evaluasi ini, dapat kita peroleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif – alternatif keputusan. Dengan demikian, Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang terdapat dalam mengambil sebuah keputusan (Catur, 2002 :32).

Suatu evaluasi program harus mengumpulkan informasi yang valid, dapat dipercaya, dan informasi yang berguna untuk program yang dievaluasi. Menurut Catur (2013: 32) program adalah sederetan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau organisasi dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi program banyak terpusat pada peserta dan proses kegiatan yang telah berjalan serta kurang memperhatikan pada metode yang digunakan dalam mengukur hasil. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa evaluasi program berhubungan dengan target yang ditentukan.

Sedangkan menurut Suharsimi dan Cepi (2010: 4) program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan program yang merupakan sebuah sistem yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi

berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi didalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

Menurut Agustanico (2017: 3),

“Evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek. Pendapat lain (Denzin and Lincoln, 2000:83) mengatakan bahwa evaluasi program berorientasi sekitar perhatian dari penentu kebijakan dari penyandang dana secara karakteristik memasukkan pertanyaan penyebab tentang program mana yang telah mencapai tujuan yang diinginkan. Keputusan-keputusan yang diambil dijadikan sebagai indikator-indikator penilaian kinerja atau *assessment performance* pada setiap tahapan evaluasi dalam tiga kategori yaitu rendah, moderat, dan tinggi”.

Berangkat dari pengertian di atas maka evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang dinilai adalah hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya evaluasi program adalah suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui ketercapaian target yang sudah ditentukan pada suatu unit atau kesatuan kegiatan program dalam sebuah sistem yang berkesinambungan sehingga dapat memberikan informasi kepada para pengambil keputusan atau kebijakan dalam mengambil keputusan untuk pelaksanaan program selanjutnya.

b. Model-Model Evaluasi

Dalam melaksanakan evaluasi program pendidikan, ada banyak model yang digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Walaupun terdiri dari banyak model, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menyediakan bahan

hasil evaluasi bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindaklanjut suatu program.

Menurut Suharsimi & Cepi (2010: 40) ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program adalah “Stufflebeam, Metfessel, Michael Seriven, Stake dan Glasser”. Ada beberapa metode evaluasi program, diantaranya (1) *goal oriented evaluation model* (2) *goalfree evaluation model* (3) *Formatif-sumatif evaluation model* (4) *Countenance evaluation model* (5) *CIPP model evaluation* (6) *Discrepancy model*. Berikut penjelasan mengenai model-model evaluasi program di antaranya adalah sebagai berikut.

1) *Goal Oriented Evaluation*

Menurut Catur (2013: 33), model ini merupakan model yang muncul paling awal. Hal yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Model evaluasi berbasis tujuan secara umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program atau proyek dapat dicapai atau tidak (Wirawan, 2011: 81). Evaluasi dilakukan berkesinambungan, terus menerus, mengecek sejauh mana tujuan tersebut sudah terlaksana didalam proses pelaksanaan program. Model ini dikembangkan oleh Tyler.

2) *Goal-Free Evaluation Approach Model (Michael Scriven's)*

Menurut Agustanico (2017: 33) Model evaluasi bebas tujuan maksudnya, bahwa para evaluator atau penilai mengambil dari berbagai laporan atau catatan pengaruh-pengaruh nyata atau kongkrit dan pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan dalam program pendidikan dan pelatihan. Perhatian khusus diberikan secara tepat terhadap usulan tujuan-tujuan dalam evaluasi, tetapi tidak dalam proses evaluasi atau produk. Keuntungan yang dapat diambil dari evaluasi bebas

tujuan, bahwa dalam evaluasi bebas tujuan para penilai mengetahui antisipasi pengaruh-pengaruh penting terhadap tujuan dasar dari penilai yang menyimpang.

3) *Formatif-Sumatif Evaluation Model*

Menurut Catur (2013: 34), "Michael Scriven mengembangkan model lain yaitu model *formatif sumatif*" (Suharsimi & Cepi, 2010: 42). Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika sudah program selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif). Berbeda dengan model evaluasi pertama kali dikembangkan, model ini ketika dilaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan.

Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan untuk masing-masing pokok bahasan. Oleh karena luas atau sempit materi yang tercangkup didalam pokok bahasan setiap mata pelajaran tidak sama maka tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan evaluasi formatif dilaksanakan dan beberapa kali untuk masing-masing mata pelajaran.

4) *Countenance Evaluation Model*

Menurut Catur (2013: 35), model ini dikembangkan oleh Stake, menurut Farida Yusuf (2000: 21) analisis proses evaluasi yang dikemukakannya membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini dan meletakan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi ialah *description* dan *judgement* dan

membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan, yaitu: *antecedents (contexts)*, *transaction (process)*, dan *Outcomes (output)*.

5) CIPP Model Evaluation

Menurut Catur (2013: 36), model evaluation ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. (1967) di Ohio State University. CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu: *Context evaluation* (evaluasi terhadap konteks), *Input evaluation* (evaluasi terhadap masukan), *process evaluation* (evaluasi terhadap proses), *Product evaluation* (evaluasi terhadap hasil).

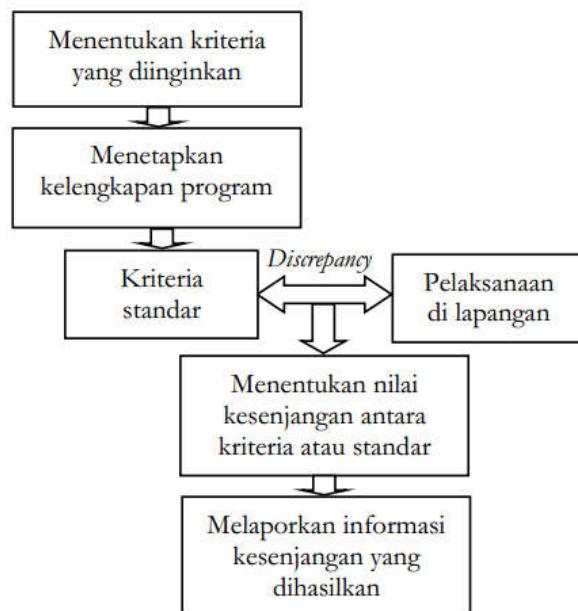
6) Discrepancy Model

Menurut Catur (2013: 37), Kata *discrepancy* adalah kata yang berasal dari bahsa inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kesenjangan”. Menurut Suharsimi & Cepi (2010: 48) “model yang di kembangkan oleh Malcolm Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan didalam pelaksanaan program”. Evaluasi program dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada pada setiap komponen. Untuk model Malcolm, menekankan pada kesenjangan yang sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang sederhana yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai.

Sedangkan menurut Fernandes (1984) dalam Agustanico (2017: 4) evaluasi model kesenjangan adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku (*standard*) yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja (*performance*) sesungguhnya dari program tersebut. Baku adalah kriteria yang

ditetapkan, sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan program. Sedangkan kesenjangan yang dapat dievaluasi dalam program pendidikan meliputi : 1) Kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan program; 2) Kesenjangan antara yang diduga atau diramalkan akan diperoleh dengan yang benar-benar direalisasikan; 3) Kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang ditentukan; 4) Kesenjangan tujuan; 5) Kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah; dan 6) Kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Oleh karena itu model evaluasi ini memiliki lima tahap yaitu desain, instalasi, proses, produk dan membandingkan.

Menurut Lantip, dkk (2018: 63) langkah-langkah evaluasi *discrepancy* terhadap implementasi standar proses pendidikan dapat dilihat dalam Gambar 2. Skema tahapan atau langkah evaluasi implementasi standar proses pendidikan dengan model evaluasi kesenjangan (*discrepancy model*) yang dikembangkan oleh Provus, sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Tahap/Langkah Evaluasi Implementasi Standar Proses Pendidikan dengan Model Evaluasi *Discrepancy Provus*
(Sumber : Jurnal Penelitian Evaluasi Pendidikan, Juni 2018)

c. Tujuan Evaluasi

Menurut Catur (2013: 38) Tujuan evaluasi terdiri atas tujuan umum (*goals*) dan tujuan khusus (*objective*). Tujuan khusus dinyatakan dalam rumusan khusus dan terbatas serta merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan evaluasi secara implisit telah terumuskan dalam definisi pengambilan keputusan. Tujuan khusus mencakup upaya untuk memberikan masukan tentang kebijaksanaan pendidikan, hasil program pendidikan, kurikulum, tanggapan masyarakat terhadap program, sumberdaya pendidikan, dampak pembelajaran dan manajemen program.

Menurut Suharsimi & Cepi (2010: 19) ada dua macam tujuan evaluasi yaitu “tujuan umum dan tujuan khusus”. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen agar dapat melakukan tugasnya maka seorang evaluator program dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen program.

Dari setiap kegiatan yang ada termasuk PKL tentunya memiliki tujuan seperti dilaksanakannya evaluasi. Tujuan dari evaluasi program ini seharusnya dirumuskan dengan tujuan dari pelaksanaan PKL yang dievaluasikan agar pengukuran tujuan dapat diketahui sisi positif dan negatifnya, dan juga dapat menunjukkan pada bagian mana dari suatu kebijakan yang perlu diperbaiki, dihapus, atau ditambahkan, dan juga penyebab-penyebabnya.

d. Manfaat Evaluasi

Suharsimi & Cepi (2010: 21) menyatakan bahwa “evaluasi program pendidikan tidak lain adalah supervisi pendidikan dalam pengertian khusus, tertuju pada lembaga secara keseluruhan”. Terdapat hubungan antara program dengan kebijakan. Program adalah rangkaian kegiatan sebagai realisasi dari suatu kebijakan. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat

diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan program yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan.

Menurut Catur (2013: 39) Dalam organisasi pendidikan, evaluasi dapat disama artikan dengan kegiatan supervisi. Secara singkat, supervisi diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan maka evaluasi program adalah langkah dalam supervisi yaitu mengumpulkan data agar dapat ditindak lanjuti dengan pemberian pembinaan yang tepat pula.

2. Implementasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (2002), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan (2004) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dari pengertian-pengertian di atas maka, Implementasi berpusat pada suatu sistem. Kesimpulannya, implementasi merupakan kegiatan yang terencana

bukan hanya satu aktivitas saja, melainkan suatu sistem aktivitas yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh yang didasarkan pada norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam Kurikulum 2013 atau yang sering lebih dikenal sebagai Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) atau Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada kurikulum 2006 merupakan Program pembelajaran yang dilaksanakan secara khusus dengan mengambil alokasi waktu tertentu dan melibatkan pihak lain diluar sistem sekolah. Tempat pelaksanaan prakerin bisa jadi Dunia Industri atau Dunia Usaha dalam bentuk Perusahaan Swasta atau Instansi Pemerintah (<https://haedarrauf.wordpress.com>). Menurut Tuatul M. (2016 : 112) Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bagian metode *Work Based Learning* dalam pendidikan kejuruan. Di samping itu, program PKL mempunyai peran yang sangat besar dalam mempersiapkan keterampilan tenaga kerja yang siap kerja sesuai dengan bidang keahlian.

a. Pengertian PKL

Menurut Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 Draft keempat menjelaskan bahwa : “Pembelajaran di dunia kerja DU/DI adalah program PKL yaitu kegiatan pembelajaran praktik untuk menerapkan, memantapan, dan meningkatkan kompetensi peserta didik”. Sementara itu, menurut Direktorat Pembinaan SMK (2008: 1) menjelaskan bahwa, “Praktik Kerja Industri yang disingkat dengan “prakerin” merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik di Dunia Kerja, sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK yaitu Pendidikan Sistem Ganda (PSG)”. Program prakerin disusun bersama

antara sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan program pendidikan SMK.

Program PKL sangat penting untuk memberikan bekal kemampuan bagi peserta didik, maka perlu dibuat suatu pedoman, sesuai dengan pernyataan pada Pasal 4 tentang Standar Proses (SP) yang dinyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran praktik di DU/DI berupa PKL yang diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jendral terkait.

PKL yang dahulu bernama Prakerin merupakan bagian dari implementasi Pendidikan Sistem Ganda dimana peserta didik melaksanakan praktik kerja di DU/DI yang merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan pelatihan di SMK. Prakerin mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan kurikulum SMK tahun 1994, dipertajam dengan kurikulum SMK edisi 1999 dan dipertegas dengan kurikulum SMK edisi 2004. Dalam dinamikanya sampai saat ini kurikulum SMK 2013 edisi revisi masih diberlakukan dengan nama Praktik Kerja Lapangan dengan masa pelaksanaan 6-10 bulan, dahulu hanya 3 bulan saja.

Pengertian lain menurut ahli, prakerin adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia usaha atau dunia industri (DU/DI), secara terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional (Wardiman, 1998: 79).

Sedangkan menurut Hamalik (2007: 21), praktik industri atau dibeberapa sekolah disebut dengan *On The Job Training* (OJT) merupakan modal pelatihan yang di selenggarakan di lapangan, bertujuan untuk memberikan kecakapan

yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi pekerjaan.

Praktik Kerja Industri adalah praktik kerja pada Perusahaan Industri dan atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang Industri (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link And Match* dengan Industri). Menurut Catur (2013: 13) praktik kerja industri adalah suatu bentuk kegiatan yang diikuti oleh siswa dengan bekerja langsung dimana dunia kerja secara terarah dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap dan keterampilan sesuai dengan cara belajar langsung di DU/DI.

Dari pengertian – pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dahulu bernama Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan siswa kejuruan baik SMK/MAK atau pendidikan kejuruan sederajat yang lain dimana siswa melaksanakan praktik kerja (magang) di DU/DI secara terarah dengan bimbingan pembimbing dari sekolah dan industri dengan tujuan membekali siswa/peserta didik dengan sikap kerja dan keterampilan menjadi lulusan yang berkarakter, terampil, dan profesional.

b. Tujuan PKL

Dalam Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 Draft keempat disebutkan bahwa tujuan PKL adalah :

- 1) Memberikan pengalaman kerja langsung (*real*) kepada peserta didik dalam rangka menanamkan (*internalize*) iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja.
- 2) Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global.
- 3) Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan.
- 4) Mengaktualisasikan salah satu bentuk aktivitas dalam penyelenggaraan Model Pendidikan Sistem Ganda (PSG) antara SMK dan Institusi Pasangan Du/Di yang memadukan secara sistematis dan sistemik.

Sementara itu, tujuan praktik kerja industri menurut Dikmenjur (2008: 2) yaitu :

- 1) Pemenuhan Kompetensi Sesuai Tuntutan Kurikulum

Penguasaan kompetensi dengan pembelajaran di sekolah sangat ditentukan oleh fasilitas pembelajaran yang tersedia. Jika ketersediaan fasilitas terbatas, sekolah perlu merancang pembelajaran kompetensi di luar sekolah (Dunia Kerja mitra). Keterlaksanaan pembelajaran kompetensi tersebut bukan diserahkan sepenuhnya ke Dunia Kerja, tetapi sekolah perlu memberi arahan tentang apa yang seharusnya dibelajarkan kepada peserta didik.

- 2) Implementasi Kompetensi ke dalam Dunia Kerja

Kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik, melalui latihan dan praktik di sekolah perlu diimplementasikan secara nyata sehingga tumbuh kesadaran bahwa apa yang sudah dimilikinya berguna bagi dirinya dan orang lain. Dengan begitu peserta didik akan lebih percaya diri karena orang lain dapat

memahami apa yang dipahaminya dan pengetahuannya diterima oleh masyarakat.

3) Penumbuhan Etos Kerja/Pengalaman Kerja

SMK sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan dapat mengantarkan tamatannya ke dunia kerja perlu memperkenalkan lebih dini lingkungan sosial yang berlaku di Dunia Kerja. Pengalaman berinteraksi dengan lingkungan Dunia Kerja dan terlibat langsung di dalamnya, diharapkan dapat membangun sikap kerja dan kepribadian yang utuh sebagai pekerja.

c. Manfaat PKL

Dalam Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 Draft keempat disebutkan bahwa PKL bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan dunia kerja. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut.

1) Manfaat Bagi Peserta Didik

- a) Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah.
- b) Menambah wawasan mengenai dunia kerja khususnya berupa pengalaman kerja langsung (*real*) dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja.
- c) Menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menamkan etos kerja yang tinggi.
- d) Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari.
- e) Mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan/ arahan pembimbing industri dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja.

2) **Manfaat Bagi Sekolah**

- a) Terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan DU/DI.
- b) Meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL.
- c) Mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, *teaching factory*, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL.
- d) Meningkatkan kualitas lulusan.

3) **Manfaat Bagi Dunia Kerja**

- a) DU/DI lebih dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk.
- b) Adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan DU/DI.
- c) DU/DI dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi peserta PKL.
- d) Mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.
- e) Meningkatkan citra positif DU/DI karena dapat berkontribusi terhadap dunia pendidikan sekaligus sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Tahun 2016 Nomor 9 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

d. Komponen PKL

PKL sebagai perwujudan dari Pendidikan Sistem Ganda (PSG) tentunya memiliki beberapa faktor yang menjadi komponen-komponen untuk tercapainya PSG sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Wardiman (1998: 80), PKL atau Prakerin sebagai wujud dari PSG sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kejuruan yang didukung beberapa komponen utama yaitu; a) Institusi pasangan; b) Program pendidikan dan pelatihan bersama yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, dan standar pendidikan dan pelatihan; c) Sistem penilaian dan sertifikasi; d) Kelembagaan dan kerjasama; e) Nilai tambah dan insentif; f) Jaminan keterlaksanaan.

1) Institusi Pasangan

Yang dimaksud institusi pasangan adalah DU/DI yang bekerjasama serta berkomitmen dengan sekolah dalam hal ini SMK untuk bersama-sama menyelenggarakan program PKL. Program PKL tidak akan berjalan apabila tidak ada institusi pasangan atau DU/DI. Selanjutnya sekolah atau SMK harus melakukan pemetaan DU/DI sebelum program PKL dirancang. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa dalam memilih DU/DI mitra SMK benar-benar sesuai dengan kompetensi keahlian yang ditekuni peserta didik sehingga tujuan PKL tercapai dengan baik.

2) Program Pendidikan dan Pelatihan Bersama

Pelaksanaan PKL sejatinya adalah milik dan tanggung jawab bersama antara SMK dan DU/DI, oleh sebab itu program PKL seharusnya dirancang dan disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan tuntutan keahlian dunia kerja saat ini Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Menurut

Wardiman (1998: 81) terdapat dua komponen dari program pendidikan dan pelatihan bersama yaitu:

a) Standar Kompetensi Lulusan

Dalam hal standar kompetensi lulusan dapat dikatakan sebagai kurikulum yang dijalankan di SMK. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Tahun 2017 Nomor 03 Pasal 3 yaitu :"Program keahlian pada SMK disesuaikan dengan kebutuhan Industri". Selain itu dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa : "kurikulum pendidikan pada setiap program keahlian di SMK disusun berbasis kompetensi mengacu pada SKKNI bidang industri, standar internasional, dan atau standar khusus". Oleh sebab itu SMK sebaiknya selalu melaksanakan penyelarasan kurikulum secara bertahap sesuai kebutuhan DU/DI. Penyelarasan kurikulum tersebut dalam penyusunannya seharusnya dilakukan dengan melibatkan asosiasi Industri, Perusahaan Industri dan atau Perusahaan Kawasan Industri. Sehingga peserta didik dalam menerima materi di SMK dengan keadaan di DU/DI akan singkron dan menjadikan siswa lulusan yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

b) Standar Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan bersama SMK dengan DU/DI, diperlukan proses pendidikan dan pelatihan yang telah diatur dalam Permenperin No 03 tahun 2017, yaitu mengenai guru SMK bidang studi produktif sesuai dengan program keahlian, peningkatan kompetensi guru produktif, pembelajaran berbasis kompetensi, SMK harus dilengkapi dengan *teaching factory*, workshop, dan atau laboratorium, dan SMK harus dilengkapi dengan infrastruktur kompetensi berupa SKKNI, LSP, TUK, dan asesor kompetensi. Menurut Wardiman (1998:81) dalam penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan yang dirancang secara terstandar dengan ukuran isi, waktu dan metode tertentu. Untuk itu perlu ditetapkan dan disepakati : (a) Materi tentang Komponen Umum (Normatif) yang sekarang masuk dalam kelompok mata pelajaran A (Muatan Nasional) dan B (Muatan Kewilayah), Komponen Dasar Kejuruan (Adaptif) yang sekarang termasuk dalam kelompok mata pelajaran C1 (Dasar Bidang Keahlian), dan Komponen Kejuruan (Produktif) yang sekarang termasuk dalam kelompok mata pelajaran C2 (Dasar Program Keahlian) dan C3 (Kompetensi Keahlian), (b) waktu yang ditentukan dari kemampuan yang harus dikuasai dan materi yang harus dipelajari peserta didik, (c) Pola pelaksanaan dan model pengaturan penyelenggaraan program.

3) Sistem Penilaian dan Sertifikasi

Pengukuran dan penilaian keberhasilan peserta didik dalam mencapai kemampuan sesuai dengan standar profesi (standar kompetensi lulusan) yang telah ditetapkan, harus dilakukan melalui proses dan sistem penilaian dan sertifikasi yang disepakati bersama. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur tentang materi ujian, pelaksanaan ujian, penentuan hasil dan sertifikasinya. Sesuai dengan Permenperin No 03 tahun 2017 Pasal 9 yaitu :"SMK menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi melalui uji kompetensi terhadap siswanya yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dimiliki oleh SMK atau Perusahaan Industri dan atau Perusahaan Kawasan Industri". Oleh sebab itu agar dapat berfungsi secara optimal sistem tersebut hendaknya dijalankan oleh suatu tim penilaian dan sertifikasi yang melibatkan unsur sekolah, unsur institusi pasangan, asosiasi profesi, organisasi pekerja dan unsur-unsur lain yang terkait dengan ketenagakerjaan. Maka dari itu sebagai bukti siswa melaksanakan PKL

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus memberikan sertifikat apabila siswa telah melaksanakan PKL (Permenperin No 03 Tahun 2013 pasal 10).

4) Kelembagaan dan Kerja Sama

Dalam buku Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui SMK oleh Wardiman (1998: 82) dijelaskan bahwasannya pelaksanaan PSG yang disimplikasikan dengan PKL memerlukan dukungan dan jaminan keterlaksanaan melalui lembaga kerjasama. Lembaga kerjasama ini melibatkan pihak pemerintah (dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dan pelatihan kejuruan (*stakeholders*), antara lain pihak KADIN, Organisasi Pekerja, Asosiasi Profesi dan Tokoh Masyarakat.

5) Nilai Tambah dan Insentif

Kerjasama yang dilaksanakan oleh SMK dan institusi pasangan atau DU/DI seharusnya didasarkan pada prinsip saling membantu, saling mengisi, dan saling melengkapi untuk kepentingan bersama. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut pelaksanaan PKL pasti akan memberikan nilai tambah bagi institusi pasangan atau DI/DI, Sekolah, dan Peserta Didik.

6) Jaminan Keterlaksanaan

Karena pelaksanaan PSG melibatkan banyak pihak, maka telah diatur peraturan-peraturan maupun undang-undang dalam pedoman untuk pelaksanaan PKL sebagai wujud implementasi PSG di SMK, yang menurut Pedoman PKL (2017: 5) yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.
- e) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- f) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- g) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.
- h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemangangan di Dalam Negeri.
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan.

- j) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Menengah Kejuruan.
- k) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Menengah Kejuruan.
- l) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Menengah Kejuruan
- m) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan.
- n) Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- o) Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

Dari kelimabelas dasar hukum tersebut sudah seharusnya program PKL sebagai wujud manifestasi PSG di SMK berjalan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program PKL sekarang dan yang akan datang.

e. Pelaksanaan PKL

Menurut Catur (2013: 37) Pelaksanaan PKL tidak terlepas dari perencanaan program PKL yang merupakan implementasi silabus ke dalam pembelajaran, yang membutuhkan metode, strategi dan evaluasi pelaksanaan yang sesuai. Rancangan PKL yang menjadi bagian dari pembelajaran perlu memperhatikan kesiapan dari dunia kerja mitra dalam melaksanakan pembelajaran kompetensi tersebut. Dalam pedoman PKL SMK N 1 Seyegan

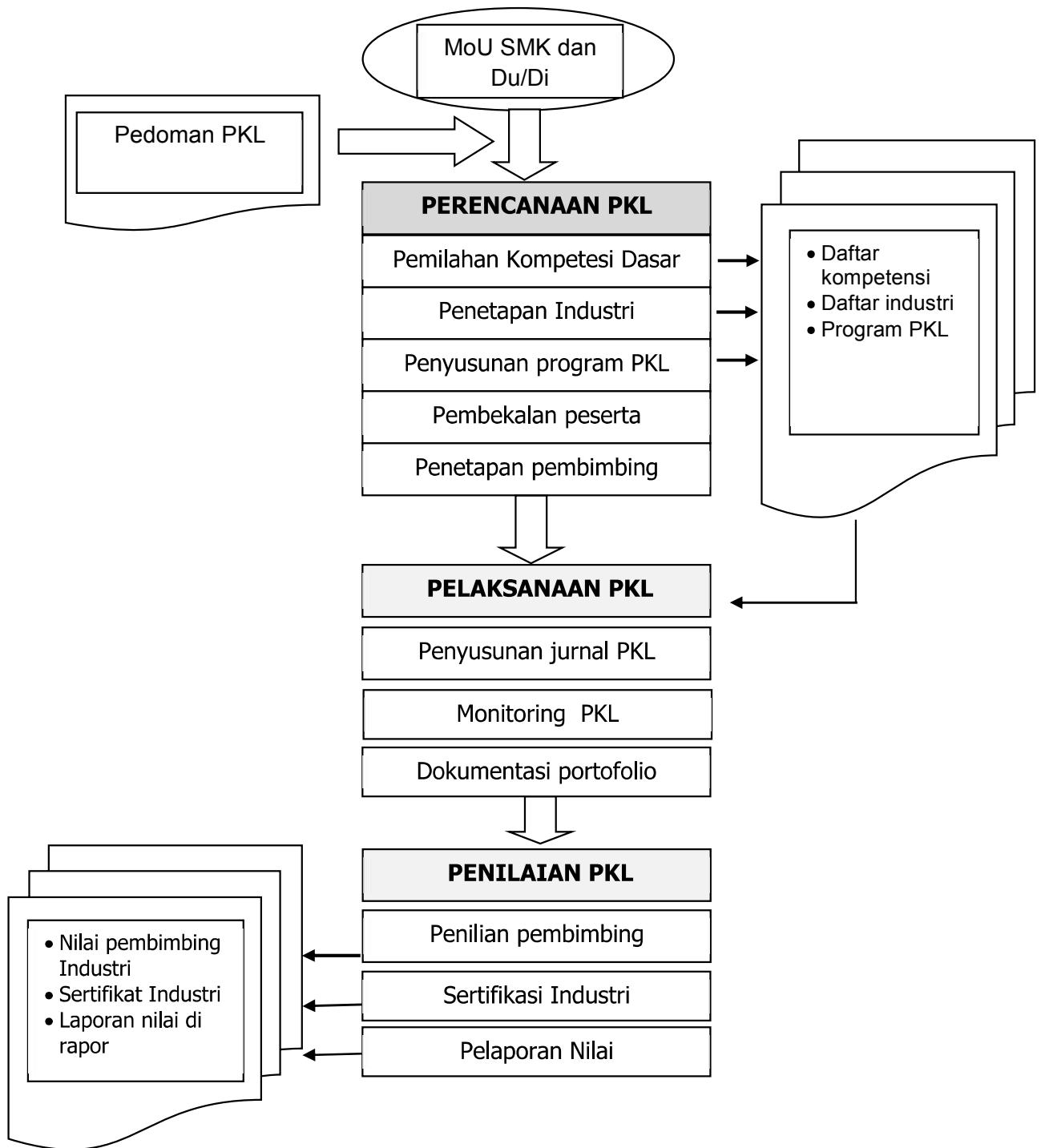
tahun 2018 dijelaskan bahwasannya setiap peserta dilengkapi dengan perangkat administrasi kegiatan berupa materi pembekalan PKL dan buku jurnal PKL. Hal tersebut dilaksanakan untuk memantau praktik siswa di Industri dengan kesesuaian kurikulum di sekolah ataupun tambahan-tambahan kegiatan yang tidak didapatkan di sekolah dan diberikan oleh industri.

Oleh karenanya pada akhir pelaksanaan PKL siswa wajib mengurus dokumen nilai PKL beserta pengesahan sertifikat kepada Pimpinan Industri. Kegiatan PKL dianggap selesai jika telah diterbitkan dan disahkannya sertifikat PKL oleh Pimpinan Industri. Oleh karena itu alur pelaksanaan PKL yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian digambarkan dalam Bagan 1. Alur Pelaksanaan PKL.

Dari Bagan 1. Alur Pelaksanaan PKL tersebut secara jelas alur atau tahapan – tahapan pelaksanaan PKL dengan cara membuka kerjasama dan menjalin hubungan yang baik dengan DU/DI yang dibuktikan dengan adanya *memorandum of understanding (MoU)* atau perjanjian untuk bersama-sama menyelenggarakan pendidikan, pelatihan kejuruan dan keberlanjutan (*sustainability*) dalam menerima siswa PKL.

Berdasarkan bagan, secara jelas ditunjukkan bahwasannya ada tiga tahap yang harus dilaksanakan untuk mengimplementasikan PSG dalam wujud PKL. Yang pertama adalah perencanaan PKL yang meliputi persiapan-persiapan sebelum siswa berangkat PKL, kedua pelaksanaan PKL yang meliputi penyusunan jurnal, pelaporan, dan monitoring oleh guru pembimbing sekolah, dan ketiga adalah penilaian PKL yang meliputi penilaian pembimbing, pemberian sertifikat dan sistem penilaian akhir.

Berikut ini disajikan Bagan 1. Alur Pelaksanaan PKL menurut pedoman PKL draft keempat yang dikeluarkan oleh direktorat Pembinaan SMK (2017) :



Gambar 2. Bagan Alur Pelaksanaan PKL
(Sumber : Draft 4 Pedoman PKL DirPSMK 2017)

Berikut tahap-tahap pengelolaan prakerin menurut Draf keempat Pedoman PKL DirPSMK tahun 2017 yang dikombinasikan dengan Panduan PKL SMK N 1 Seyegan dan Buku Saku PKL SMK N 2 Depok Sleman yaitu :

1) Perencanaan Program PKL

a) Pemilihan Kompetensi dan Pemilihan Industri

Pemilihan kompetensi adalah proses menganalisis KD dan pembelajaran praktik atau pekerjaan yang ada dalam silabus. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan sumber daya yang dimiliki sekolah dan pihak Institusi Pasangan. Berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya masing-masing institusi pasangan tersebut, diperoleh kejelasan tentang KD dan pembelajaran praktik yang dapat dipelajari oleh peserta didik dalam kegiatan PKL.

Pemetaaan dilakukan berdasarkan peluang pembelajaran praktik di masing-masing DU/DI. Penetapan industri bertujuan untuk memperoleh data Institusi Pasangan yang sesuai dengan KD, dan dapat bekerjasama dalam meningkatkan hubungan antara sekolah dengan dunia kerja. Pemilihan industri dapat pula dikatakan sebagai pendataan tempat peserta didik dalam melaksanakan PKL. Dalam Pedoman PKL SMK N 1 Seyegan dijelaskan bahwa sekolah memberikan informasi data tentang nama-nama DU/DI yang memenuhi kualifikasi sebagai tempat PKL, dan juga siswa dapat mengajukan perusahaan lain yang sekiranya memiliki kualifikasi setara dengan ketentuan pihak sekolah. Adapun persyaratan DU/DI sebagai tempat PKL yaitu : (1) bidang pekerjaan DU/DI sesuai dengan kompetensi keahlian, (2) memiliki order pekerjaan yang rutin dan memadai secara ekonomis, (3) mempunyai latar belakang manajemen

yang baik dan tertib, (4) lokasi DU/DI berada di daerah sekitar tempat tinggal siswa, di luar daerah atau luar negeri.

b) Penyusunan Program PKL

Berdasarkan hasil penentuan industri, selanjutnya sekolah menyusun program PKL yang memuat sejumlah Kompetensi Dasar yang akan dipelajari peserta didik di dunia kerja. KD yang tidak dapat dilakukan pembelajarannya di industri wajib dilaksanakan di sekolah ataupun sebaliknya. Rancangan program PKL sebagai bagian integral dari program pembelajaran perlu memperhatikan kesiapan Institusi Pasangan begitupula pembelajaran di sekolah harus terintegrasi dengan Institusi Pasangan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan, penempatan peserta didik tepat sasaran.

c) Pengaturan Pelaksanaan PKL

Pengaturan pelaksanaan PKL diatur dalam Pedoman PKL DirPSMK tahun 2017 sebagai berikut :

- (1)Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 6-10 bulan yang dapat dilakukan pada kelas XI dan atau kelas XII untuk program 3 tahun dan atau kelas XII dan XIII untuk program 4 tahun.
- (2)Praktik kerja lapangan dapat dilaksanakan menggunakan pola harian (120 - 200 hari), atau pola mingguan (24-40 minggu) atau pola bulanan (6-10 bulan).
- (3)Untuk memenuhi pemerataan jumlah jam di Institusi Pasangan/Industri yang memiliki jam kerja kurang dari 5 hari per minggu maka sekolah perlu mengatur rotasi/perputaran kelompok peserta PKL.
- (4)Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan dapat dilakukan di satuan pendidikan dan/atau industri

(terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio sebagai instrumen utama penilaian.

(5) Jika pembelajaran mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan tidak terintegrasi dalam kegiatan PKL maka pembelajaran mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan tersebut dilakukan di satuan pendidikan (sebelum PKL atau setelah kembali dari kegiatan PKL) dengan jumlah jam setara dengan jumlah jam satu semester.

Selain itu untuk SMK program 4 tahun, diadakan program magang, yaitu kegiatan belajar dalam pekerjaan, di mana siswa tahun terakhir SMK dikirim ke industri untuk belajar sambil bekerja. Setelah beberapa waktu, antara 3 sampai 6 bulan mereka kembali ke sekolah untuk menyelesaikan tahapan akhir pembelajarannya. Untuk siswa SMKN2 Depok kegiatan magang di industri bagi siswa tingkat IV nya dilakukan selama satu tahun penuh. Melalui kegiatan magang ini sekolah memperkenalkan kualitas calon lulusannya sehingga industri dapat memperoleh informasi tentang kompetensi siswa calon lulusan SMK yang bersangkutan. Sementara itu siswa lebih mengenal dunia kerja dan dunia industri di tempat mereka melakukan magang. Tidak sedikit atau bahkan sebagian besar siswa yang magang setelah lulus dapat diterima bekerja di industri di mana ia magang (Th. Sukardi dan Putut H., 2007 : 158).

d) Pembekalan Peserta PKL

Pembekalan peserta PKL dilakukan terhadap peserta didik yang akan melaksanakan PKL. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang kegiatan belajar yang harus dilakukan di Institusi Pasangan/Industri. Materi pembekalan PKL bagi peserta didik antara lain meliputi: (1) Karakteristik budaya kerja di industri, (2) tata aturan kerja di industri,

(3) penyusunan jurnal dan pembuatan dokumen potofolio, serta (4) sistem penilaian PKL.

Pembimbing PKL terdiri atas pembimbing sekolah dan pembimbing industri. Pembimbing dari pihak sekolah adalah guru yang bertanggung-jawab terhadap pembelajaran kompetensi yang pembelajarannya dilaksanakan di Institusi Pasangan/Industri, dan pembimbing industri yang sekaligus bertindak selaku instruktur yang mengarahkan peserta didik dalam melakukan pekerjaannya di Institusi Pasangan/Industri.

e) Uraian Tugas Pembimbing Sekolah dan Industri

Menurut Pedoman PKL DirPSMK (2017: 23) guru pembimbing maupun pembimbing industri memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

(1)Pembimbing Sekolah

(a)Merencanakan teknis pelaksanaan PKL bersama dengan Wakil Kepala sekolah bidang Hubin dan kepala kompetensi keahlian dalam mengantar dan menyerahkan siswa ke DU/DI sampai dengan menarik kembali siswa apabila PKL sudah selesai.

(b)Melakukan koordinasi dengan unsur terkait demi lancarnya pelaksanaan PKL begitupula dalam pelaksanaan monitoring siswa.

(c)Mengadakan koordinasi pelaksanaan PKL dengan Wakil Kepala sekolah bidang Hubin dan kepala kompetensi keahlian.

(d)Memantau dan merespon terhadap informasi dan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik selama PKL.

(e)Melayani konsultasi peserta didik terhadap permasalahan yang dihadapinya di perusahaan tempat pelaksanaan PKL.

- (f) Melayani konsultasi peserta didik dalam pembuatan laporan melalui media komunikasi yang ada khususnya berkaitan dengan tata tulis laporan.
 - (g) Memberi pengarahan, nasehat, dan bimbingan material maupun moral kepada siswa.
 - (h) Menerima hasil penilaian dari pembimbing industri.
- (2) Pembimbing Industri
- (a) Merencanakan teknis pelaksanaan PKL bersama peserta PKL dan pembimbing sekolah.
 - (b) Melakukan koordinasi dengan unsur terkait di DU/DI demi lancarnya pelaksanaan PKL.
 - (c) Membimbing dari ranah sikap, keterampilan maupun pengetahuan selama peserta didik PKL.
 - (d) Memantau dan merespon terhadap informasi dan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik selama PKL.
 - (e) Melayani konsultasi peserta didik terhadap permasalahan yang dihadapinya di perusahaan tempat pelaksanaan PKL khususnya yang berkaitan dengan substansi kompetensi yang dipelajari ditempat PKL.
 - (f) Melayani konsultasi peserta didik dalam pembuatan dokumen portofolio PKL.
 - (g) Memeriksa dan mengesahkan buku jurnal.
 - (h) Menilai hasil kegiatan praktik siswa.
 - (i) Menyerahkan hasil penilaian siswa PKL kepada bagian PKL atau WKS 4 melalui guru pembimbing
- f) Tata Tertib Peserta Didik

Selama siswa melaksanakan kegiatan PKL diharuskan mengikuti seluruh tata tertib yang diatur dalam pedoman masing-masing sekolah. Berikut adalah tata tertib kombinasi dari panduan PKL SMK N 1 Seyegan (2018: 3) dan Buku Saku Pelaksanaan PKL SMK N 2 Depok Sleman (2017: 3), yaitu :

- (1)Siswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di DU/DI
- (2)Siswa berada di tempat PKL 15 menit sebelum jam kerja
- (3)Berlaku sopan, jujur, bertanggung jawab, kreatif, dan berinisiatif terhadap tugas-tugas yang diberikan
- (4)Sewaktu datang mengucap salam dan mengisi daftar hadir
- (5)Mengenakan seragam sekolah ketika datang/pulang dan pakaian kerja pada saat bekerja di lapangan/bengkel
- (6)Mintaati petunjuk dalam menggunakan alat dan bahan
- (7)Memberitahu kepada pembimbing industri apabila berhalangan hadir
- (8)Melaporkan dengan segera kepada pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kesalahan
- (9)Membersihkan dan mengatur kembali peralatan dengan rapi seperti semula apabila telah selesai bekerja
- (10)Siswa dilarang merokok
- (11)Siswa dilarang menerima tamu tanpa seijin perusahaan
- (12)Khusus untuk siswi dilarang memakai pakaian yang kurang pantas seperti rok mini, sepatu berhak tinggi, dan perhiasan yang menyolok
- (13)Pelaksanaan PKL untuk program 3 tahun 3 bulan dan program 4 tahun 6 bulan dengan waktu minimal adalah 1 bulan
- (14)Siswa diperbolehkan melaksanakan PKL lebih dari satu tempat

(15) Apabila siswa dalam melaksanakan PKL melanggar peraturan di tempat PKL maka sekolah sepenuhnya menyerahkan kepada DU/DI perihal sanksi yang diberikan kesiswa dan sekolah menindaklanjuti dan mencari solusi

(16) Apabila siswa tidak melaksanakan PKL dan atau diberikan SP3 oleh DU/DI maka sanksi terberat dikembalikan kepada Orang Tua / Wali

2) Pelaksanaan Program PKL

a) Jurnal Kegiatan PKL

Selama melakukan kegiatan pembelajaran di Institusi Pasangan/Industri, peserta didik wajib menyusun jurnal kegiatan PKL. Jurnal ini dibuat selengkap mungkin sesuai dengan topik-topik pembelajaran/jenis pekerjaan dan tugas-tugas lain yang diberikan pembimbing industri serta catatan kejadian-kejadian penting (pengalaman belajar) selama kegiatan PKL di Institusi Pasangan/Industri.

b) Dokumentasi Portofolio PKL

Dokumentasi portofolio Praktik Kerja Lapangan disusun oleh peserta didik di bawah pembinaan pembimbing Institusi Pasangan/Industri. Pembuatan dokumentasi portopolio dilakukan dengan cara mengompilasi catatan-catatan pengalaman belajar dari seluruh pekerjaan/kegiatan pembelajaran di Institusi Pasangan/Industri yang berasal dari jurnal kegiatan PKL. Hasil kompilasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen portopolio. Dokumentasi portopolio PKL sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut : halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Proses dan Hasil belajar di DU/DI, Bab 3 Penutup.

3) Penilaian PKL

Setiap siswa peserta PKL berhak diberikan nilai yang tertera dalam sertifikat apabila telah memenuhi kewajibannya. Dalam kurikulum KTSP aspek penilaian hanya meliputi : aspek kemampuan teknis yang memuat bidang atau jenis pekerjaan dengan dinyatakan secara kuantitatif dengan skor 0-100 dan mencantumkan jumlah jam kerja dengan aspek kognitif dan psikomotorik, aspek kemampuan non-teknis yang meliputi pengorganisasian dan implementasi pekerjaan, komunikasi dan kerjasama, penerapan teknik belajar dan metode kerja, kemandirian, tanggung jawab, sikap, dan kebersihan atau aspek afektif dinyatakan secara kualitatif (amat baik, baik, cukup, kurang).

Penilaian PKL menurut Panduan Penilaian pada Sekolah Menengah Kejuruan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah Kejuruan (Desember 2015, halaman 45-68) kurikulum 2013 dinyatakan bahwa penilaian PKL meliputi penilaian hasil belajar peserta didik selama mengikuti program PKL dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan PKL. Hasil penilaian yang disampaikan dalam rapor bebentuk diskripsi dengan mencantumkan keterangan industri tentang kinerja siswa secara keseluruhan yang disampaikan melalui jurnal PKL maupun sertifikat atau surat keterangan PKL dari Industri.

a) Penilaian Peserta Didik

Penilaian hasil belajar peserta didik selama melaksanakan program PKL Realisasi Pendidikan Sistem Ganda dilakukan secara menyeluruh mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan sedangkan untuk PKL pemantapan kompetensi dilakukan untuk ranah sikap dan keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik di Institusi Pasangan/Industri dilakukan oleh pembimbing industri, sedangkan instrumen penilaianya disiapkan oleh sekolah. Prinsip-

prinsip penilaian hasil belajar peserta didik di Institusi Pasangan/Industri adalah sama dengan penilaian hasil belajar di sekolah.

b) Pemberian Sertifikat PKL

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang “Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link and match* dengan Industri pada Pasal 10 Ayat (4) dinyatakan bahwa “Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri memberikan sertifikat kepada siswa dan guru bidang studi produktif yang telah menyelesaikan Praktik Kerja Industri dan/ atau Pemagangan Industri”. Pemberian sertifikat juga diberikan oleh industri pada peserta magang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemangangan di Dalam Negeri Pasal 19 dinyatakan bahwa: (1) peserta pemagangan yang telah memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh perusahaan diberikan sertifikat pemagangan, (2) dalam hal pemagangan yang tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh perusahaan diberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan.

c) Pelaporan Nilai PKL dalam Rapot

(1)Nilai Rapot PKL Pemantapan Kompetensi

Nilai PKL dinyatakan dalam Rapot peserta didik ditulis sebagai “Nilai Praktik Kerja Lapangan” seperti tercantum pada Panduan Penilaian Sekolah Menengah Kejuruan halaman 80 dan 85. Nilai PKL terdiri dari nilai sikap (amat baik, baik, cukup) dan nilai keterampilan (25-100). Nilai yang dicantumkan dalam rapot merupakan nilai kombinasi antara nilai keterampilan dan sikap dengan formula yang ditetapkan satuan pendidikan.

(2)Nilai Rapot PKL Realisasi Pendidikan Sistim Ganda

Selain menuliskan nilai PKL dalam rapot, nilai PKL diintegrasikan dalam nilai mata pelajaran. Nilai mata pelajaran kompetensi kejuruan yang dilakukan di sekolah dan di industri baik nilai keterampilan maupun pengetahuan dihitung berdasarkan nilai KD dari industri maupun dari sekolah tergantung tempat pembelajaran KD tersebut. Formulasi perhitungan nilai mata pelajaran dari nilai KD dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian SMK tahun 2015 seperti dilakukan untuk mata pelajaran kejuruan lainnya. Pembobotan nilai dari industri dan dari sekolah dipertimbangkan jumlah KD dan waktu pembelajaran setiap KD. Jika dalam satu semester seluruh KD pelajari saat PKL maka nilai mata pelajaran diambil seluruhnya dari nilai PKL. Komponen penilaian PKL peserta didik Realisasi Pendidikan Sistim Ganda diperoleh dari : (1) Nilai dari pembimbing industri meliputi nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan pada setiap KD yang yang dipelajari peserta didik di DU/DI, dan (2) Nilai dari pembimbing sekolah meliputi nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan pada setiap KD yang yang dipelajari peserta didik di sekolah.

d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKL

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik guna meningkatkan mutu pelaksanaan PKL. Lingkup monitoring pelaksanaan PKL meliputi penempatan, penyusunan program PKL, materi PKL, keterlaksanaan program PKL, intensitas pembimbingan, permasalahan selama peserta didik selama PKL dan lain-lain.

Menurut buku saku pedoman PKL SMK N 2 Depok Sleman (2017: 4) menyatakan bahwa monitoring dilaksanakan untuk siswa atau kelompok siswa pada satu perusahaan tempat PKL untuk rentang waktu minimal 2 bulan.

Sedangkan untuk rentang waktu PKL satu bulan hanya ada kegiatan penyerahan dan penarikan. Pemantauan pelaksanaan PKL dapat dilaksanakan melalui kunjungan langsung, pembicaraan melalui telepon atau permintaan recruitmen berulang.

Kegiatan PKL dimonitor oleh kelompok kerja PKL melalui guru-guru pembimbing yang dilakukan setiap 1 bulan. Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan PKL berjalan sesuai dengan harapan sekolah dan DU/DI. Disamping itu agar dapat mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi selama pelaksanaan PKL. Dari hasil monitoring guru pembimbing diharapkan melengkapi pengisian format monitoring dengan lengkap sehingga pokja PKL memperoleh laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan PKL di DU/DI Dwi S.I. dan Soeharto (2015: 276) .

Menurut Catur (2013: 26) Hasil monitoring yang dilaksanakan kemudian dilakukan pendataan siswa-siswa bermasalah dan penanganan langsung untuk menghindari permasalahan yang lebih serius permasalahan yang sering muncul adalah absensi dan pelanggaran disiplin pada tenggang waktu adaptasi/penyesuaian lingkungan kerja di industri. Bagi siswa yang bermasalah dan industri tidak dapat menerima kembali maka siswa dipindahkan pada industri lain yang siap menerima dengan pemantauan yang lebih intensif. Jika dalam periode yang ditentukan ternyata siswa tidak bisa menyelesaikan dengan sepenuhnya maka siswa harus melaksanakan PKL pada waktu setelah selesai belajar dan dilaksanakan diluar jam belajar, tempat industri yang memiliki pekerjaan disekolah/unit produksi sekolah. Dari hasil monitoring juga dicatat dan direkap kegiatan siswa untuk memperoleh data kompetensi keahlian yang dilakukan oleh siswa dan akhirnya disesuaikan dengan yang ada disekolah yang

selanjutnya digunakan sebagai alat verifikasi DU/DI pada pelaksanaan prakerin periode berikutnya sehingga ini memudahkan siswa untuk memilih industri sesuain keahliannya.

3. Pendidikan Kejuruan SMK

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1) disebutkan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam mendapatkan pendidikannya, seluruh warga di Indonesia diatur sesuai jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan dari ketiga jenjang terdapat jenis pendidikan yang berbeda meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Dalam kajian teori ini akan dikaji mengenai salah satu jenjang dan jenis pendidikan yaitu jenjang pendidikan

menengah dengan jenis pendidikan kejuruan atau sekarang disebut Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

a. Pengertian Sekolah Menengah Kejuruan

Menurut Rupert Evans dalam Wardiman (1998: 33) mendefinisikan pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Definisi lain dalam sebuah kongres *United State Congress* (Wardiman, 1998: 34), menyatakan pendidikan kejuruan adalah program pendidikan yang secara langsung dikaitkan dengan penyiapan seseorang untuk suatu pekerjaan tertentu atau untuk mempersiapkan karier seseorang. Pengertian tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) yang menyatakan bahwa “pendidikan kejuruan diartikan sebagai pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu”.

Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) termasuk ke dalam lingkup pendidikan kejuruan dalam jenjang menengah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah di jenjang pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat (Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Dari pengertian – pengertian di atas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu salah satu bentuk dari pendidikan formal menengah dalam lingkup jenis pendidikan kejuruan. SMK bertujuan untuk menyiapkan lulusan untuk menjadi tenaga kerja terampil atau ditingkat menengah yang disamping itu juga dapat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Enik (2017: 19), Ketentuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan selain memenuhi persyaratan penyelenggaraan, jumlah dan tingkat pendidikan guru, kurikulum, fasilitas dan pembiayaan, sekolah kejuruan harus memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja, termasuk dunia usaha dan industri

b. Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan

Menurut Suwandi (2016: 94) tentang arah dan tujuan pendidikan di Indonesia diera tahun 2000an, arah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan menuju pada perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu; pengembangan kemampuan akademik dan profesional tenaga kependidikan, pembaharuan kurikulum, pemberdayaan lembaga pendidikan, pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan, peningkatan kualitas lembaga pendidikan, pengembangan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin, penguasaan pengembangan dan pemanfaatan teknologi, dengan sasaran peningkatan angka

partisipasi, kesamaan memperoleh pendidikan bermutu, organisasi sekolah yang demokratis, transparan, efisien dan *accountable*.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) disebutkan bahwa tujuan pendidikan menengah kejuruan terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan menengah kejuruan yaitu :

- 1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab;
- 3) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; dan
- 4) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien.

Sedangkan tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya;

- 2) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya;
- 3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
- 4) Membekali peserta didik dengan kompetensi- kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

Selain dari tujuan umum dan khusus Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tersebut, ada tujuan-tujuan lain dari para ahli, menurut Rupert Evans dalam Wardiman (1998: 36) merumuskan bahwa pendidikan kejuruan bertujuan untuk (a) memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja, (b) mendorong motivasi untuk belajar terus menerus, dan (c) meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individu.

Begitu pula dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Tahun 1990 Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah Kejuruan Pasal 3 Ayat 2 disebutkan bahwa, Sekolah menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Hal tersebut berarti lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan harus siap bekerja dengan profesional dalam tahapan pekerja terampil dalam mengaplikasikan keahliannya pada lapangan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.

Penjabaran dari rumusan tujuan SMK dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1990 Nomor 29 tersebut dijabarkan dalam Keputusan Mendikbud Nomor 0490/U/1990 tentang Sekolah Menengah Kejuruan pasal 2 ayat 1 yaitu :

- 1) Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan meluaskan pendidikan dasar;
- 2) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar;
- 3) Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; dan
- 4) Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional.

c. Kebijakan Pengembangan SMK

Dalam kajian filosofis, Charles Prosser dalam *Vocational Education in Democracy* (Camp and Hillison, 1984: 15 – 16), telah memberikan rambu-rambu tentang penyelenggaraan pendidikan kejuruan, khususnya tentang rambu-rambu pembelajaran kejuruan yang efektif atau lebih dikenal dengan 16 teori Prosser, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Vocational education will be efficient in proportion as the environment in which the learner is trained is a replica of the environment in which he must subsequently work.* (Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana tempat peserta didik dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti bekerja).
- 2) *Effective vocational training can only be given where the training jobs are carried on in the same way, with the same operations, the same tools, and the same machines as in the occupation itself.* (Pelatihan kejuruan akan efektif hanya jika tugas-tugas diklat pekerjaan dilakukan dengan cara yang sama,

operasi yang sama, alat, dan mesin yang sama seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri).

- 3) *Vocational education will be effective in proportion as it trains the individual directly and specifically in the thinking habits and the manipulative habits required in the occupation it self.* (Pendidikan kejuruan akan efektif jika secara langsung dan secara khusus melatih kebiasaan berpikir dan bekerja seperti dipersyaratkan di dalam pekerjaan itu sendiri).
- 4) *Vocational education will be effective in proportion as it enables each individual to capitalize on his interests, aptitudes, and intrinsic intelligence to the highest degree.* (Pendidikan kejuruan akan menjadi efektif jika setiap individu memodali minatnya, bakatnya, kecerdasannya pada tingkat yang paling tinggi).
- 5) *Effective vocational education for any profession, trade, occupation, or job can only be given to the selected group of individuals who need it, want it, and are able to profit by it.* (Pendidikan kejuruan efektif untuk setiap profesi, keterampilan, jabatan, pekerjaan hanya untuk setiap orang yang membutuhkan, menginginkan dan dapat memberi keuntungan).
- 6) *Vocational training will be effective in proportion as the specific training experiences for forming right habits of doing and thinking are repeated to the point that these habits become fixed to the degree necessary for gainful employment.* (Pelatihan kejuruan akan efektif jika pengalaman-pengalaman diklat membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulang sehingga sesuai atau cocok dengan pekerjaan).
- 7) *Vocational education will be effective in proportion as the instructor has had successful experiences in the application of skills and knowledge to the*

operations and processes he undertakes to teach. (Pendidikan kejuruan akan efektif jika guru/instrukturnya mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan skill dan pengetahuan (kompetensi) pada operasi dan proses kerja yang telah dilakukan).

- 8) *For every occupation there is a minimum of productive ability which an individual must possess in order to secure or retain employment in that occupation.* (Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia dapat bekerja pada jabatan tersebut)
- 9) *Vocational education must recognize conditions as they are and must train individuals to meet the demands of the “market” even though it may be true that more efficient ways for conducting the occupation may be known and better working conditions are highly desirable.* (Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar atau tanda-tanda pasar dalam melatih setiap individu).
- 10) *The effective establishment of process habits in any learner will be secured in proportion as the training is given on actual jobs and not on exercises or pseudo jobs.* (Pembiasaan efektif pada peserta didik tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan nyata sarat nilai).
- 11) *The only reliable source of content for specific training in an occupation is in the experiences of masters of that occupation.* (Isi diklat khusus dalam sebuah pekerjaan merupakan okupasi pengalaman para ahli).
- 12) *For every occupation there is a body of content which is peculiar to that occupation and which practically has no functioning value in any other occupation.* (Untuk setiap okupasi atau pekerjaan terdapat ciri-ciri isi (body of content) yang berbeda-beda satu dengan lainnya).

- 13) *Vocational education will render efficient social services in proportion as it meets the specific training needs of any group at the time that they need it and in such a way that they can most effectively profit by the instruction.* (Pendidikan kejuruan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan sekelompok orang yang pada saatnya memang memerlukan dan memang paling efektif dilakukan lewat pengajaran kejuruan).
- 14) *Vocational education will be socially efficient in proportion as in its methods of instruction and its personal relations with learners it takes into consideration the particular characteristics of any particular group which it serves.* (Pendidikan kejuruan secara sosial akan efisien jika metoda pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik).
- 15) *The administration of vocational education will be efficient in proportion as it is elastic and fluid rather than rigid and standardized.* (Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika dia luwes dan mengalir daripada kaku dan terstandar).
- 16) *While every reasonable effort should be made to reduce per capita cost, there is a minimum level below which effective vocational education cannot be given, and if the course does not permit this minimum of per capita cost, vocational education should not be attempted.* (Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi).

Dari keenambelas teori tersebut diambil 8 teori yang berhubungan dengan Praktik Kerja Lapangan siswa yaitu :

- 1) Pendidikan kejuruan akan efisien apabila disediakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi nyata di mana lulusan akan bekerja. Hal ini dapat diartikan bahwa sekolah harus menyediakan atau menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kondisi dunia kerja yang sebenarnya.
- 2) Latihan kejuruan akan efektif apabila diberikan tugas atau program sesuai dengan apa yang akan dikerjakan lulusan kelak. Demikian pula, fasilitas atau peralatan beserta proses kerja dan operasionalnya juga dibuat sama dengan kondisi kerja nantinya. Hal ini berarti bahwa isi program atau kurikulum pendidikan kejuruan harus relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Selain itu, SOP proses pelaksanaan pekerjaan dan fasilitas pelatihan yang disediakan juga harus sesuai dengan yang diterapkan di dunia kerja.
- 3) Pendidikan kejuruan akan efektif bilamana latihan dan tugas-tugas yang diberikan berkaitan untuk mengerjakan benda kerja yang sesungguhnya, bukan sekedar tiruan. Hal ini dapat diartikan bahwa latihan dan tugas-tugas yang diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya, dan bukan simulatif.
- 4) Pendidikan kejuruan akan efektif, bilamana dalam latihan kerja atau dalam pengerajan tugas-tugas sudah dibiasakan seperti pada kondisi yang sebenarnya. Ini dapat dimaknai bahwa latihan kerja atau tugas-tugas yang diberikan harus dikondisikan atau dibiasakan seperti yang berlaku di dunia kerja.
- 5) Latihan kejuruan akan efektif apabila diberikan secara berulang, hingga diperoleh penguasaan yang memadai bagi peserta didik. Hal ini dapat dimaknai bahwa pelatihan keterampilan kejuruan harus dilakukan secara berulang. Makin sering dilatihkan akan makin baik keterampilannya.

- 6) Pendidikan kejuruan akan efektif apabila para guru dan instrukturnya berpengalaman dan mampu mentransferkan pengalamannya tersebut kepada peserta didik. Hal ini dapat diartikan bahwa pembelajaran kejuruan harus dilakukan oleh guru yang profesional dan berpengalaman, serta mampu mentransfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara baik.
- 7) Pendidikan kejuruan akan efektif apabila program pendidikan kejuruan dirumuskan berdasarkan kondisi nyata pekerjaan di lapangan. Hal ini dapat diartikan bahwa isi program atau kurikulum pendidikan kejuruan harus selalu disinkronkan dengan kondisi dunia kerja yang terus berkembang.
- 8) Pendidikan kejuruan akan efektif apabila memberikan program tertentu yang mendasar sebagai dasar-dasar kejuruan serta program lain sebagai pengembangan. Hal ini berarti bahwa pendidikan kejuruan terutama harus membekalkan keahlian dasar kejuruan, sehingga lulusan akan lebih mudah beradaptasi dengan kompetensi baru sejalan dengan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran kejuruan di SMK akan berjalan dengan baik (efektif dan efisien), apabila mampu memenuhi karakteristik dasar tersebut di atas. Selanjutnya, dari beberapa teorema tersebut mencerminkan prinsip-prinsip pembelajaran kejuruan yang ideal, baik yang menyangkut isi/materi pembelajaran dan pelatihan kejuruan, penyiapan lingkungan pembelajaran, serta penyiapan sarana dan prasarana yang menunjang, ketersediaan guru dan instruktur yang kompeten, pemberian tugas-tugas pelatihan, proses pelatihan, maupun kegiatan pembiasaan.

Sementara itu, arah pengembangan SMK di Indonesia ke depan didasarkan pada kebijakan revitalisasi SMK, sesuai Instruksi Presiden Tahun 2016 Nomor 9 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia Indonesia. Revitalisasi pendidikan di SMK merupakan gambaran visi (kondisi ideal) mengenai proses penyelenggaraan pendidikan di SMK, yang harus dijadikan acuan semua pihak dan arah pengembangan SMK ke depan (Tim Revitalisasi Pendidikan Vokasi Kemendikbud, 2016). Revitalisasi pendidikan di SMK terutama menyangkut perubahan filosofi dari *supply-driven* ke arah *demand-driven*. Dalam hal ini, pendidikan kejuruan diarahkan pada penerapan sistem ganda (*dual-system*), yakni belajar teori di SMK dan praktik di industri. Oleh karena itu, desain kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem pengujinya juga harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri.

Revitalisasi pendidikan di SMK secara operasional diwujudkan dalam perubahan dan perbaikan pada berbagai aspek pendidikan, yaitu: (1) perubahan paradigma pendidikan kejuruan, (2) peningkatan mutu pembelajaran, dengan menerapkan pembelajaran abad XXI, Pergeseran Pembelajaran dari Kompetensi ke Kapabilitas, (3) peningkatan kerjasama dengan DU/DI, (4) penanaman jiwa kewirausahaan, (5) adaptasi dan kontekstualisasi lokal, (6) pelibatan dan pemanfaatan DU/DI sebagai: tempat praktik kerja (PKL), tempat magang kerja, dan tempat belajar manajemen dunia kerja, (7) penyelarasan kurikulum SMK, sesuai dengan model dual system yang diterapkan, baik dalam penetapan kegiatan praktik kerja maupun pembelajaran melalui *teaching factory*, dan (8) sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK.

Adapun konsep revitalisasi SMK yang terkait secara langsung dengan peningkatan mutu proses pembelajaran, termasuk PKL, dapat dijelaskan pada uraian berikut.

1) Perubahan Paradigma Pendidikan Kejuruan

Barnet Berry dalam monografnya yang berjudul *The Teachers of 2030: Creating a Student-Centered Profession for the 21st Century*, telah menggambarkan perubahan yang dramatik peran pendidik dalam praksis pendidikan abad ini. Cara pandang bahwa misi pendidikan adalah menyiapkan peserta didik untuk memasuki profesi tertentu pada jenis peran sosial yang sudah terstruktur di masyarakat sudah harus mulai ditinggalkan. Tugas pendidikan ke depan justru akan berbalik menjadi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan diri peserta didik dalam menciptakan profesi (Berry, 2013). Perubahan cara pandang tentang pendidikan dan peran pendidik tersebut, sudah barang tentu akan berimplikasi pada perubahan praksis pendidikan kita, terutama yang berkaitan dengan kurikulum dan perlunya inovasi pembelajaran kejuruan.

Demikian pula, perubahan orientasi pendidikan kejuruan dari pembentukan kompetensi ke arah pengembangan kapabilitas akan menjadi tantangan perlunya penyesuaian kurikulum dan inovasi terhadap pembelajaran yang biasa diterapkan selama ini. Orang yang kapabel adalah mereka yang tahu bagaimana belajar, kreatif, memiliki tingkat *self-efficacy* yang tinggi, dapat menerapkan kompetensi baik dalam situasi baru (*novelty*) maupun situasi yang familier, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Dibandingkan dengan kompetensi, yang melibatkan akuisisi pengetahuan dan keterampilan, kapabilitas adalah atribut holistik. Orang yang kapabel lebih mungkin dapat menangani persoalan

secara efektif dalam lingkungan dan kondisi yang selalu berubah, karena mereka memiliki kapasitas “serba bisa”.

Perluasan dari model kompetensi ke model pengembangan kapabilitas ini merupakan perubahan mendasar dalam orientasi dan fokus pendidikan kejuruan saat ini, yang akan berimplikasi pada pergeseran dari paradigma “pengajaran” ke paradigma “belajar”, atau dari orientasi “*job*” diperluas ke orientasi “kehidupan”, yang memberi peluang tumbuhnya kemandirian. Demikian pula, pendekatan pembelajaran kejuruan yang berorientasi pada *expert-centered learning* dan *work-based learning*, bergerak atau memperluas orientasi belajarnya ke *life-based learning*. Model pendidikannya juga akan mengalami perluasan dari model pelatihan (*training model*) dan model pengembangan profesional (*professional development model*) ke arah model pengembangan kapabilitas (*capability development model*).

2) Peningkatan Mutu Pembelajaran

Secara operasional, revitalisasi pendidikan kejuruan yang terkait langsung dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran kejuruan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Mengimplementasikan Pembelajaran Abad XXI

Pembelajaran Abad XXI adalah pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai kompetensi, yang meliputi: kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknik. Selain itu, juga perlu diterapkan konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan/ESD (*Education for Sustainable Development*), yaitu pendidikan yang berupaya memberikan peserta didik dua jenis kecakapan, yaitu: (1) pengetahuan, kemampuan, dan nilai-nilai

untuk menjawab tantangan-tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi pada Abad XXI, serta (2) kecakapan untuk membantu merawat dan memulihkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta keadilan sosial.

b) Peningkatan Kerja Sama dengan DU/DI

Pendidikan kejuruan yang baik adalah pendidikan kejuruan yang dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, proses pembelajaran haruslah sesuai dan selaras dengan DU/DI. Kehadiran DU/DI bukan hanya sebagai tempat bagi peserta didik untuk melakukan praktik magang. Namun, pelibatan DU/DI harus merefleksikan implementasi dari keahlian ganda DU/DI dengan sekolah agar tujuan pendidikan bisa tercapai.

Proses pelibatan DU/DI ini terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran kejuruan, yang meliputi: (1) pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum menjadi lebih relevan dengan kebutuhan; (2) memanfaatkan DU/DI untuk memberikan pelatihan bagi guru, sehingga guru dapat terus memutakhirkan pengetahuan dengan mengikuti perkembangan teknik yang sesuai dengan program kejuruan; (3) meminta DU/DI untuk mengirimkan tenaga profesionalnya sebagai guru pendamping atau mentor bagi peserta didik; dan (4) melibatkan DU/DI dalam pembiayaan pendidikan, termasuk dilibatkan dalam pembangunan laboratorium, tempat praktik atau pemberian bantuan peralatan praktik kepada sekolah.

c) Penanaman Jiwa Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)

Fakta menunjukkan bahwa tidak semua lulusan SMK bisa diterima pada DU/DI yang terkait dengan program keahliannya. Oleh karena itu, peserta didik

diharapkan juga bisa memiliki kemampuan berwirausaha (*entrepreneurship*), sehingga bukan hanya menjadi tenaga kerja yang terampil, tetapi juga mampu menciptakan usaha baru atau menciptakan profesi baru.

Program pendidikan di SMK bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk lebih siap memasuki dunia kerja (Depdiknas, 2009: 5). Lulusan SMK yang tidak memperoleh pekerjaan dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, idealnya harus dapat berwirausaha, karena selama belajar di SMK mereka telah dibekali dengan mata pelajaran kemampuan produktif dan mata pelajaran kewirausahaan. Namun kenyataannya, lulusan SMK yang tidak bekerja dan melanjutkan pendidikan cenderung tidak dapat berwirausaha. Artinya bahwa selama ini pembelajaran kewirausahaan di SMK belum efektif menghantarkan lulusannya untuk mampu berwirausaha secara mandiri.

Untuk itu, tantangan yang dihadapi SMK adalah bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran Kewirausahaan di sekolah, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kewirausahaan, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dan keterampilan untuk berwirausaha. Keterampilan berwirausaha juga bisa dibangun dengan melatih peserta didik untuk menjual hasil-hasil karya peserta didik kepada masyarakat atau DU/DI secara langsung, atau disalurkan melalui unit keterampilan (unit produksi dan jasa) di satuan pendidikan yang mendapat bantuan modal dan menjual hasil produksinya. Pengalaman berwirausaha seperti ini yang harus dipupuk dan diperaktikkan selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

d) Pelibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Idealnya, pendidikan kejuruan menekankan pada pendidikan yang mampu menyesuaikan dengan: (1) permintaan pasar (*demand driven*); (2) kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan; dan (3) kecocokan (*match*) antara kompetensi calon tenaga kerja (*employee*) dengan kebutuhan pengusaha (*employer*). Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi, yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipelajari di SMK.

Kerjasama lembaga pendidikan kejuruan dengan DU/DI, dapat diwujudkan tidak sekedar sebagai tempat praktik, dan sebagai tempat magang untuk menambah wawasan tentang dunia kerja kepada peserta didiknya, tetapi juga dapat difungsikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMK dalam hal berikut.

(1) Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Praktik Peserta Didik

Banyak satuan pendidikan kejuruan yang tidak memiliki peralatan dan fasilitas praktik yang memadai untuk melaksanakan praktik keahlian, agar lulusan mencapai standar kompetensi yang disyaratkan. Akibatnya, industri harus mengadakan pelatihan tambahan untuk menyiapkan tenaga kerjanya, pihak industri harus mengalokasikan biaya ekstra di luar biaya produksi.

Disparitas yang terjadi antara kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja dan kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan kejuruan merupakan permasalahan yang tak pernah selesai. Sebenarnya, pihak sekolah maupun pihak industri memiliki keterbatasan masing-masing dalam membentuk dan mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai. Pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas pelaksanaan praktik,

sedangkan pihak DU/DI memiliki keterbatasan sumber daya pendidikan untuk membentuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, keterlibatan industri sebagai tempat praktik peserta didik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi disparitas yang terjadi sehingga mampu menciptakan kemampuan kerja para lulusan SMK yang adaptif dan sesuai dengan dunia kerja.

Kegiatan praktik kerja di dunia kerja, yang dikenal dengan istilah praktik kerja industri (dalam istilah sekarang Praktik Kerja Lapangan atau PKL), memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan kompetensi yang tidak didapatkan di sekolah, memperoleh pengetahuan tentang perkembangan yang terjadi di DU/DI, dan wawasan tentang dunia kerja.

(2) Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Magang Kerja

Sistem magang (*apprenticeship*) merupakan sistem pendidikan kejuruan yang paling tua dalam sejarah pendidikan kejuruan. Sistem magang merupakan sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang untuk memperdalam dan menguasai keterampilan yang lebih rumit yang tidak mungkin atau tidak pernah dilakukan melalui pendidikan massal di sekolah.

Dalam sistem magang seseorang yang belum ahli (*novices*) belajar dengan orang yang telah ahli (*expert*) dalam bidang kejuruan tertentu. Sistem magang kerja di industri memberikan pengalaman langsung bagi para peserta didik mengenai kegiatan bekerja langsung pada pekerjaan yang sesungguhnya, dengan tujuan untuk menguasai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI, serta memahami budaya kerja, sikap profesional yang diperlukan, budaya mutu, dan pelayanan konsumen.

Industri sebagai tempat magang kerja tidak hanya memberikan manfaat bagi para peserta didik, tetapi industri juga merasakan kontribusi para peserta

didik selama pelaksanaan magang serta industri bisa membentuk para peserta didik untuk menjadi seorang tenaga terampil yang siap bekerja. Tentunya hal ini akan menguntungkan bagi industri untuk memperoleh tenaga kerja yang sudah terlatih sehingga tidak perlu lagi mengadakan pelatihan dalam menyiapkan tenaga kerja yang mereka butuhkan.

(3) Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Belajar Manajemen Dunia Kerja

Selain sebagai tempat magang untuk memahami proses dan budaya kerja, industri juga dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran tentang manajemen dan organisasi produksi. Dalam hal ini, peserta didik di SMK tidak hanya melakukan pengamatan mengenai cara pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang digunakan, akan tetapi secara tidak langsung juga belajar tentang mutu dan efisiensi produk. Selain itu, peserta didik juga belajar tentang manajemen dan organisasi industri untuk belajar tentang dunia usaha dan cara pengelolaan usaha sehingga mereka memiliki wawasan dan pengetahuan tentang dunia usaha. Melalui belajar manajemen dan organisasi ini peserta didik juga bisa menambah kapabilitas pada dunia wirausaha. Pengalaman yang diperoleh peserta didik dari DU/DI tersebut diharapkan akan bisa mengembangkan bakat dan potensinya setelah lulus nanti, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada dunia kerja, tetapi juga mengembangkan usaha baru sebagai wirausaha mandiri.

e) Penyelarasan Kurikulum

Penyelarasan kurikulum SMK perlu dilakukan secara periodik dengan melibatkan penggunaan lulusan. Penyelarasan adalah mempertemukan antara sisi pasokan (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*) yang mencakup beberapa dimensi, yaitu kualitas, kompetensi, kuantitas, lokasi dan waktu.

Salah satu strategi untuk memastikan agar kurikulum SMK dapat selaras dan memenuhi kebutuhan DU/DI adalah model *dual system*. *Dual system* pada pendidikan kejuruan merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Bila pada pendidikan umum, program pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sepihak dan lebih bertumpu kepada kepemimpinan kepala sekolah dan guru, maka pada program *dual system* pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama secara terpadu antara sekolah dan institusi pasangannya. Secara operasional, fungsi tersebut dilaksanakan bersama antara kepala sekolah, guru, instruktur, dan pihak DU/DI terkait.

Tujuan utama *dual system* adalah untuk menjamin keberlanjutan keterserapan tenaga kerja pada pasar kerja sesuai dengan perkembangan teknik dan kebutuhan DU/DI. Secara umum, struktur *dual system* meliputi: (1) kurikulum harus dirancang dengan berorientasi pada penggabungan antara *instruction* dan *construction* sehingga pendekatan utama dalam pembelajaran mengacu pada fase pembelajaran di sekolah dan praktik/pelatihan di DU/DI; dan (2) kegiatan praktik kerja, dilaksanakan menggunakan sistem blok pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan tahapan pekerjaan di DU/DI.

f) Penyelenggaraan *Teaching Factory (TeFa)*

Mengingat DU/DI sebagai tempat peserta didik untuk magang daya tampungnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang

memerlukan tempat magang, maka dikembangkanlah *teaching factory*. *Teaching factory*, merupakan pabrik atau tempat berproduksi yang sekaligus sebagai tempat peserta didik pendidikan kejuruan melaksanakan praktik peningkatan keterampilan.

Teaching Factory adalah sebuah proyek industri yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dalam disain, manufaktur, dan realisasi produk. *Teaching Factory* mengembangkan kurikulum yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan teori dan analisis dengan manufaktur, perancangan, kegiatan bisnis, dan keterampilan untuk menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya.

Konsepsi dasar *teaching factory* adalah “*Factory to Classroom*” yang bertujuan untuk melakukan transfer lingkungan produksi di DU/DI secara nyata ke dalam ruang praktik. Kehidupan produksi yang nyata sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran peserta didik yang berbasis kehidupan nyata di dunia kerja.

Factory di sini hanyalah istilah dan bukan berarti pabrik secara *hardware*. Namun, bentuknya berupa pembelajaran yang dilakukan langsung di tempat kerja, tidak di dalam kelas, dan praktik yang dilakukan berorientasi pada produksi seperti di dunia kerja yang sebenarnya. Penyelenggaraan model ini memadukan sepenuhnya antara belajar dan bekerja, tidak lagi memisahkan antara pembelajaran teori dan praktik.

Pembelajaran melalui *teaching factory*, pada dasarnya merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan dua lingkungan utama dalam setiap kegiatan belajar peserta didik, yakni lingkungan sekolah dan lingkungan dunia kerja. Dalam hal ini, peserta didik tidak hanya melakukan kegiatan belajar di

sekolah, tetapi juga melakukan praktik (kompetensi dasar) dan kerja (mengaplikasikan kompetensinya) di dunia kerja dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Dengan pembelajaran seperti ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga mampu menerapkan praktik keterampilan berbasis produksi sebagaimana yang selalu diterapkan dalam kegiatan di dunia kerja yang sesungguhnya. Prosedur ini akan membuat peserta didik mampu memperoleh keterampilan, proses dan sikap yang sesuai dengan standar yang berlaku di dunia kerja, sehingga hasil pendidikan di SMK akan sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Konsep pembelajaran berbasis industri berarti bahwa setiap produk praktik yang dihasilkan adalah sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomi atau memiliki nilai jual yang dapat diterima oleh pasar.

Sinergi dan interaksi antara sekolah dan DU/DI yang berkesinambungan akan mendorong terjadinya perbaikan secara terus-menerus dalam hal teknik, kurikulum dan budaya industri sehingga akan berdampak terhadap lulusan yang kompeten dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh DU/DI, yaitu sadar akan kualitas dan efisiensi sebagaimana yang selalu diterapkan dalam kegiatan di dunia kerja.

4. Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti

Sesuai dengan spektrum SMK menurut Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan seiring diberlakukannya kurikulum K2013 edisi revisi, dalam bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa

untuk program keahlian Teknik Bangunan diganti nama menjadi Teknologi Konstruksi dan Properti.

a. Pengertian Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti

Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti merupakan jurusan yang mempelajari tentang pembuatan dan pengaplikasian sebuah desain / rancangan rumah (www.smkn5solo.sch.id). Nama program keahlian ini dirubah dari Teknik Bangunan menjadi Teknologi Konstruksi dan Properti sejak dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Di SMK saat ini masih menggunakan K2013 lama dengan program keahlian Teknik Bangunan yang masih diberlakukan untuk kelas 12. Untuk program keahlian Teknik Bangunan terdapat 4 paket keahlian. Paket keahlian tersebut yaitu : Teknik Konstruksi Baja, Teknik Konstruksi Kayu, Teknik Konstruksi Batu dan Beton, dan Teknik Gambar Bangunan. Berikut adalah struktur kurikulum dari masing-masing kompetensi keahlian tersebut.

1) Teknik Gambar Bangunan

Tabel1. Struktur Kurikulum Teknik Gambar Bangunan

MATA PELAJARAN	KELAS					
	X		XI		XII	
	1	2	1	2	1	2
Kelompok A (Wajib)						
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	3	3	3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2
3 Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4
4 Matematika	4	4	4	4	4	4
5 Sejarah Indonesia	2	2	2	2	2	2
6 Bahasa Inggris	2	2	2	2	2	2
Kelompok B (Wajib)						

MATA PELAJARAN		KELAS					
		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2
7	Seni Budaya	2	2	2	2	2	2
8	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2	2	2	2
9	Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan	3	3	3	3	3	3
Kelompok C (Kejuruan)							
C1. Dasar Bidang Keahlian							
10	Fisika	2	2	2	2	-	-
11	Kimia	2	2	2	2	-	-
12	Gambar Teknik	2	2	2	2	-	-
C2. Dasar Program Keahlian							
13	Simulasi Digital	3	3				
14	Mekanika Teknik	4	4	-	-	-	-
15	Konstruksi Bangunan	7	7	-	-	-	-
16	Rencana Anggaran Biaya	4	4	-	-	-	-
C3. Paket Keahlian							
	Teknik Gambar Bangunan (004)	-	-	18	18	24	24
17	Gambar Konstruksi Bangunan	-	-	10	10	12	12
18	Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung	-	-	2	2	6	6
19	Menggambar dengan Perangkat Lunak	-	-	6	6	6	6
D. Muatan Lokal							
1.	Bahasa Inggris	2	2				
2.	Bahasa Jawa			2	2		
3.	Kejuruan					2	2
4.	BK	1	1	1	1	1	1
TOTAL		51	51	51	51	51	51

(Sumber: Struktur Kurikulum 2013)

2) Teknik Konstruksi Batu dan Beton

Tabel 2. Struktur Kurikulum Teknik Konstruksi Batu dan Beton

MATA PELAJARAN		KELAS					
		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2
Kelompok A (Wajib)							
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	3	3	3
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4

MATA PELAJARAN		KELAS					
		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2
4	Matematika	4	4	4	4	4	4
5	Sejarah Indonesia	2	2	2	2	2	2
6	Bahasa Inggris	2	2	2	2	2	2
Kelompok B (Wajib)							
7	Seni Budaya	2	2	2	2	2	2
8	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2	2	2	2
9	Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan	3	3	3	3	3	3
Kelompok C (Kejuruan)							
C1. Dasar Bidang Keahlian							
10	Fisika	2	2	2	2	-	-
11	Kimia	2	2	2	2	-	-
12	Gambar Teknik	2	2	2	2	-	-
C2. Dasar Program Keahlian							
13	Simulasi Digital	3	3				
14	Mekanika Teknik	4	4	-	-	-	-
15	Konstruksi Bangunan	7	7	-	-	-	-
16	Ukur Tanah	4	4	-	-	-	-
C3. Paket Keahlian							
Teknik Konstruksi Batu dan Beton (003)	Teknik Konstruksi Batu dan Beton (003)		-	-	18	18	24
	17	Konstruksi Batu	-	-	6	6	8
	18	Konstruksi Beton Bertulang	-	-	6	6	8
	19	Finishing Bangunan	-	-	6	6	8
TOTAL		48	48	48	48	48	48

(Sumber: Struktur Kurikulum 2013)

Untuk program keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti terdapat 4 kompetensi keahlian dengan program pendidikan 3 dan 4 tahun. Kompetensi keahlian tersebut yaitu : Konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan, Konstruksi jalan, irigasi dan jembatan, Bisnis Konstruksi dan Properti, dan Desain pemodelan dan informasi bangunan. Berikut adalah struktur kurikulum dari masing-masing kompetensi keahlian tersebut.

1) Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jembatan (program 4 tahun)

Tabel 3. Struktur Kurikulum Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jembatan

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu
A. Muatan Nasional		
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	318
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	212
3.	Bahasa Indonesia	354
4.	Matematika	424
5.	Sejarah Indonesia	108
6.	Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya	488
B. Muatan Kewilayah		
1.	Seni Budaya	108
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	144
C. Muatan Peminatan Kejuruan		
C1. Dasar Bidang Keahlian		
1.	Simulasi dan Komunikasi Digital	108
2.	Fisika	108
3.	Kimia	108
C2. Dasar Program Keahlian		
1.	Gambar Teknik	144
2.	Mekanika Teknik	108
3.	Dasar-dasar Konstruksi Bangunan	108
4.	Teknik Pengukuran Tanah	108
C3. Kompetensi Keahlian		
1.	Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jembatan	460
2.	Teknik Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Jalan	586
3.	Teknik Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Irigasi	552
4.	Teknik Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Jembatan	620
5.	Estimasi Biaya Pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jembatan	688
6.	Produk Kreatif dan Kewirausahaan	586
Total		6.440

(Sumber: Struktur Kurikulum 2013 Edisi Revisi)

2) Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan (program 4 tahun)

Tabel 4. Struktur Kurikulum Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu
A. Muatan Nasional		
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	318
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	212
3.	Bahasa Indonesia	354
4.	Matematika	424
5.	Sejarah Indonesia	108
6.	Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya	488
B. Muatan Kewilayah		
1.	Seni Budaya	108
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	144
C. Muatan Peminatan Kejuruan		
C1. Dasar Bidang Keahlian		
1.	Simulasi dan Komunikasi Digital	108

2.	Fisika	108
3.	Kimia	108
C2. Dasar Program Keahlian		
1.	Gambar Teknik	144
2.	Mekanika Teknik	108
3.	Dasar-dasar Konstruksi Bangunan	108
4.	Teknik Pengukuran Tanah	108
C3. Kompetensi Keahlian		
1.	Konstruksi Bangunan Gedung	762
2.	Sistem Utilitas Bangunan Gedung	796
3.	Perawatan Gedung	622
4.	Estimasi Biaya Konstruksi, Sanitasi, dan Perawatan Gedung	690
5.	Produk Kreatif dan Kewirausahaan	622
Total		6.440

(Sumber: Struktur Kurikulum 2013 Edisi Revisi)

3) Bisnis Konstruksi dan Properti (program 3 tahun)

Tabel 5. Struktur Kurikulum Bisnis Konstruksi dan Properti

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu
A. Muatan Nasional		
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	318
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	212
3.	Bahasa Indonesia	354
4.	Matematika	424
5.	Sejarah Indonesia	108
6.	Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya	352
B. Muatan Kewilayahan		
1.	Seni Budaya	108
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	144
C. Muatan Peminatan Kejuruan		
C1. Dasar Bidang Keahlian		
1.	Simulasi dan Komunikasi Digital	108
2.	Fisika	108
3.	Kimia	108
C2. Dasar Program Keahlian		
1.	Gambar Teknik	108
2.	Mekanika Teknik	108
3.	Dasar-dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah	252
C3. Kompetensi Keahlian		
1.	Perencanaan Bisnis Konstruksi dan Properti	420
2.	Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dan Properti	596
3.	Estimasi Biaya Konstruksi dan Properti	350
4.	Pengelolaan Bisnis Konstruksi dan Properti	348
5.	Produk Kreatif dan Kewirausahaan	350
Total		4.876

(Sumber: Struktur Kurikulum 2013 Edisi Revisi)

- 4) Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (program 3 tahun)

Tabel 6. Struktur Kurikulum Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu
A. Muatan Nasional		
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	318
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	212
3.	Bahasa Indonesia	354
4.	Matematika	424
5.	Sejarah Indonesia	108
6.	Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya	352
B. Muatan Kewilayah		
1.	Seni Budaya	108
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	144
C. Muatan Peminatan Kejuruan		
C1. Dasar Bidang Keahlian		
1.	Simulasi dan Komunikasi Digital	108
2.	Fisika	108
3.	Kimia	108
C2. Dasar Program Keahlian		
1.	Gambar Teknik	108
2.	Mekanika Teknik	108
3.	Dasar-dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah	252
C3. Kompetensi Keahlian		
1.	Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung	596
2.	Konstruksi Jalan dan Jembatan	350
3.	Estimasi Biaya Konstruksi	348
4.	Konstruksi dan Utilitas Gedung	420
5.	Produk Kreatif dan Kewirausahaan	350
Total		4.876

(Sumber: Struktur Kurikulum 2013 Edisi Revisi)

b. Tujuan Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 telah menjelaskan tujuan umum dari pendidikan nasional di Indonesia yang tentunya sebagai acuan dalam segala pelaksanaan pendidikan di Indonesia dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Secara khusus tujuan Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten untuk :

- 1) Bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagai tenaga kerja terampil tingkat menengah dalam bidang teknologi konstruksi.
- 2) Mandiri atau berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam bidang teknologi konstruksi.
- 3) Memilih karir, berkompetisi, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang teknologi konstruksi.

B. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian Badrun Kartowagiran dkk. (2017), menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) telah memenuhi kriteria minimal. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa meskipun proses pelaksanaan PKL (dulu Prakerin) sudah berjalan baik, namun masih ada aspek yang masih lemah. Adapun pelaksanaan yang masih kurang antara lain: proses pelaksanaan PKL adalah dalam aspek frekuensi monitoring dan pembimbingan siswa yang sedang menjalankan PKL. Dalam hal ini, frekuensi pembimbing PKL dalam melakukan monitoring dan pembimbingan terhadap siswa yang sedang melaksanakan PKL hanya dilakukan setiap bulan. Sedangkan menurut penilaian siswa, aspek pelaksanaan PKL yang masih lemah terletak pada durasi (lama) waktu pelaksanaan PKL yang hanya berkisar antara 2 – 3 bulan.

Sementara itu, hasil penelitian Dwi Sapitri Iriani dan Soeharto (2013) tentang evaluasi pelaksanaan praktik kerja industri siswa kompetensi keahlian jasa boga SMK Negeri 3 Purworejo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen konteks yang ditinjau dari: tujuan program Prakerin, kerjasama DU/DI dengan sekolah, dan kesesuaian pelaksanaan Prakerin dengan kurikulum, telah dilaksanakan sesuai

dengan panduan tujuan program Prakerin di SMK Negeri 3 Purworejo; (2) Secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen input telah dilaksanakan sesuai dengan panduan program Prakerin; dan (3) Secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen proses telah dilaksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan program Prakerin; (4) Secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen produk telah dilaksanakan dan sesuai dengan tujuan program Prakerin; (5) Sekolah, dalam hal ini pokja Prakerin, telah melaksanakan tahapan kegiatan Prakerin dengan baik, yang dimulai dari tahap persiapan, pembekalan peserta Prakerin, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hingga penarikan kembali siswa oleh pihak sekolah; (6) Kurikulum implementatif, sebagai kurikulum sinkronisasi yang disusun oleh pihak DU/DI dan pihak sekolah benar-benar telah diterapkan pada kegiatan Prakerin siswa sehingga pelaksanaan Prakerin berjalan lancar, efisien dan efektif; dan (7) pihak sekolah selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak DU/DI, sehingga sangat membantu pelaksanaan kegiatan Prakerin siswa di DU/DI.

Demikian pula, hasil penelitian Firmansyah Aditya (2013), tentang pelaksanaan praktik kerja industri di SMKN 4 Surabaya dapat disimpulkan bahwa: tahapan proses pelaksanaan praktik kerja industri (Prakerin) yang dilakukan oleh sekolah dan guru masih belum sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini didasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: (1) tahapan pelaksanaan Prakerin (PKL) belum sesuai yang direncanakan, karena menyesuaikan dengan kurikulum dan kondisi di lapangan, (2) proses pelaksanaan praktik kerja industri (PKL) yang dilakukan siswa sudah cukup baik, dan dilaksanakan oleh siswa sesuai prosedur yang ada, (3) meskipun di beberapa tempat prakerin siswa diberikan tugas yang kurang sesuai dengan

keahliannya, namun sekolah dan siswa masih menyikapi positif terhadap hal seperti itu karena prakerin ini juga ditujukan untuk memperoleh pengalaman lapangan pekerjaan sebelum peserta didik lulus dari SMK.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian evaluasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (dulu disebut Prakerin) di SMK selama ini berlangsung dengan kualitas yang cukup variatif. Hal ini sangat tergantung pada kesiapan SMK dalam menyelenggarakan PKL, baik pada tahap koordinasi dengan DU/DI pasangan, pembekalan peserta PKL, pembimbingan, maupun monitoring dan evaluasinya.

Secara rinci, aspek yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran melalui PKL adalah: (1) belum semua sekolah telah menyusun kurikulum implementatif, yang merupakan sinkronisasi serta pengaturan kegiatan pembelajaran di sekolah dan kegiatan PKL di DU/DI, (2) pihak sekolah belum melakukan sinkronisasi kompetensi (kompetensi apa yang perlu diberikan oleh SMK dan kompetensi apa yang harus diberikan oleh DU/DI), (3) sebagian SMK masih kebingungan mengatur blok waktu pembelajaran di sekolah dan PKL di DU/DI; (4) kerjasama antara SMK dan DU/DI sebagai tempat PKL belum dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, sebagian pihak DU/DI masih memandang bahwa pelaksanaan PKL oleh siswa justru bersifat mengganggu; (5) sebagian DU/DI memberikan tugas yang kurang sesuai dengan keahlian siswa di SMK; (6) pembekalan siswa PKL yang diberikan oleh pihak sekolah belum memadai, sehingga DU/DI banyak direpotkan karena harus memberikan pembekalan tambahan; (7) sebagian SMK, dan peserta PKL, kurang bersungguh-sungguh melaksanakan program PKL, dan terkesan hanya asal jalan.

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan program PKL (yang dulu bernama Prakerin) di SMK yang diklaim sebagai implementasi Pendidikan Sistem Ganda (*Dual System*), yang merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang memadukan secara sistemik dan sistematik antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Akan tetapi dalam kenyataannya, penelitian maupun evaluasi mengenai implementasi program PKL (yang dulu bernama Prakerin) di SMK telah banyak dilakukan, diantaranya yang dilakukan oleh Gustion (2012), Dwi Sapitri Iriani (2014), Tifa Wisanti (2015), dan Arif Wiji Santosa (2013), telah menggambarkan bahwa Prakerin sebagai implementasi PSG, ada yang telah berjalan baik dan sesuai prosedur dan ada yang belum sesuai prosedur seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian yang relevan.

Fokus utama masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program PKL SMK siswa program keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti di Kabupaten Sleman, sehingga dapat menghasilkan output yang baik yang memiliki pengalaman tentang dunia industri dengan dibuktikan melalui ujian PKL atau sistem sertifikasi. Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tentang seberapa jauh tingkat kesesuaian antara program yang telah direncanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan PKL.

Langkah-langkah untuk mewujudkan kesesuaian antara program PKL yang telah direncanakan berdasarkan pedoman PKL seperti terlihat dalam Gambar 1. Bagan Alur Pelaksanaan PKL menjelaskan bahwasannya terdapat 3 tahapan

yang harus dilaksanakan meliputi : (1) perencanaan PKL dalam hal ini adalah tingkat ketersiapan siswa sebelum PKL, (2) Pelaksanaan PKL, dan (3) Penilaian PKL.

Persiapan PKL siswa dimulai sejak peserta didik masuk ke SMK hingga mereka mendapatkan bekal untuk melaksanakan praktik di DU/DI. Sebelum peserta didik terjun melaksanakan PKL sudah seharusnya pihak sekolah bekerjasama dengan DU/DI pasangan menyelenggarakan pembekalan PKL. Program pembekalan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang kegiatan belajar yang harus dilakukan peserta didik di DU/DI. Materi yang diberikan oleh sekolah dan DU/DI seharusnya mencakup : (1) karakteristik budaya kerja di industri, (2) tata aturan kerja di industri, (3) manfaat dan gambaran bagi siswa mengenai lingkungan kerja di DU/DI. Adapun kesemua itu dilaksanakan dengan waktu yang cukup, sistematis, dan jelas. Sehingga dalam pelaksanaannya siswa tidak kebingungan dan melaksanakan PKL dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh pengalaman dan kompetensi keahlian yang diharapkan dari pelaksanaan PKL.

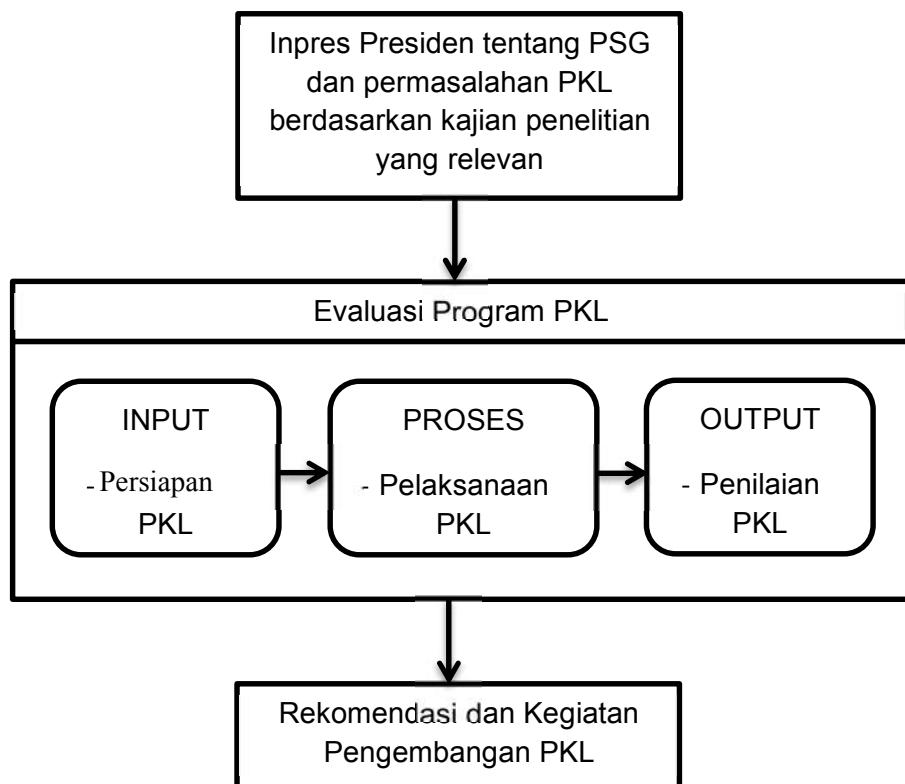
Selanjutnya setelah dilaksanakan persiapan PKL, peserta didik melangkah pada tahap pelaksanaan PKL. Dalam pelaksanaan PKL ini, peserta didik diharapkan melaksanakan PKL sesuai dengan kompetensi keahliannya di SMK (linier) dan peserta didik benar-benar seperti bekerja bukan hanya menjadi pesuruh untuk mengirim surat, meminta tanda tangan, dll. Dalam melaksanakan PKL siswa diharapkan menerima pekerjaan yang sesuai dengan porsinya sebagai praktikan juga dapat menjalin hubungan baik dengan lingkungan kerja serta dapat menggunakan dengan baik fasilitas dan peralatan yang disediakan di DU/DI dengan pendampingan pembimbing industri. Tidak hanya siswa yang

harus mentaati semua peraturan mengenai pelaksanaan PKL. Guru pembimbing sekolah sudah seharusnya memberikan bimbingan dan arahan bagi siswa secara rutin agar meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan seperti : siswa membolos, dan sembrono dalam bekerja. Begitu pula dengan pembimbing industri sudah seharusnya memberikan bimbingan, arahan kepada peserta didik sesuai tanggung jawab siswa dan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai cara kerja, tugas serta tanggung jawab, budaya mutu, proses kerja, budaya kerja, standar kinerja, juga melatih siswa dalam keterampilan melayani konsumen dan teknik pelaksanaan pekerjaan yang benar. Sehingga siswa dapat bekerja menguntungkan perusahaan dan menguntungkan siswa sendiri dengan mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan dari sekolah.

Setelah pelaksanaan PKL selesai, tahapan selanjutnya adalah penilaian PKL yang dilaksanakan oleh pembimbing industri dan diterima oleh guru pembimbing sekolah. Penilaian juga dilaksanakan oleh guru pembimbing sekolah meliputi penilaian sikap, pelaksanaan pekerjaan, dan kedisiplinan. Sedangkan pembimbing industri lebih banyak menilai dan memantau siswa dalam pelaksanaan pekerjaan, sikap siswa, serta tugas dan tanggung jawab siswa. Sehingga program PKL tersebut dinyatakan selesai bagi siswa yang bersangkutan sejak siswa tersebut mendapatkan sertifikat PKL yang diberikan oleh DU/DI.

Dalam dinamikanya, ketiga proses di atas terkadang dibeberapa SMK hanya dilaksanakan dengan asal jalan saja seperti yang sudah dipaparkan dalam kajian penelitian yang relevan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya evaluasi program PKL tersebut, sehingga dapat menjadi masukan/*outcome* bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) seperti SMK dan DU/DI pasangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian tersebut di atas dapat dijelaskan dalam suatu model pendekatan yang tampak dalam Gambar 3 berikut :



Gambar 3. Kerangka Pikir Evaluasi Implementasi PKL Siswa SMK Teknologi Konstruksi dan Properti di Kabupaten Sleman

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka secara rinci pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa tingkat pencapaian persiapan siswa dalam implementasi praktik kerja lapangan (PKL) siswa SMK Teknologi Konstruksi dan Properti di Kabupaten Sleman?

2. Seberapa tingkat pencapaian implementasi praktik kerja lapangan (PKL) siswa SMK Teknologi Konstruksi dan Properti di Kabupaten Sleman?
3. Seberapa tingkat pencapaian penilaian praktik kerja lapangan (PKL) siswa SMK Teknologi Konstruksi dan Properti di Kabupaten Sleman?